BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasaan pelaksanaan Kerja Praktek tersebut dan setelah penulis menganalisa, memahami, dan mempelajari serta menguraikan masalah tentang Prosedur dan Proses Penghapusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Orang Pribadi, maka penulis mencoba menyimpulkan beberapa hasil kegiatan Kerja Praktek yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta, yaitu :

1. Prosedur dan proses penghapusan NPWP dilakukan setelah Wajib Pajak mengajukan berkas permohonan penghapusan NPWP di bagian Seksi Pelayanan dengan menggunakan formulir pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak beserta mengisi persyaratannya, kemudian petugas Seksi Pelayanan akan membuat dokumen pengajuan permohonan tersebut dan selanjutnya mendisposisi dokumen tersebut kepada Seksi Pemeriksaan untuk dilakukan proses pemeriksaan. Jika hasil proses pemeriksaan telah memenuhi persyaratan, maka Wajib Pajak diharuskan untuk membuat surat permohonan penghapusan NPWP yang harus ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepala Seksi Pelayanan. Selanjutnya, surat permohonan tersebut diserahkan ke bagian Pelaksana Pelayanan untuk dilakukan proses penghapusan NPWP. Lamanya proses penghapusan NPWP paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dari Wajib

2. Pajak dan dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai tunggakan pembayaran pajak.
3. Kendala yang terjadi yaitu saat dilakukannya proses pemeriksaan lapangan untuk pengecekan kebenaran data alamat yang telah diberikan oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak tersebut sudah tidak lagi berada di alamat tersebut. Jadi petugas pajak pun mengalami kesulitan untuk melakukan proses selanjutnya, dan proses penghapusan NPWP tersebut ditunda terlebih dahulu.
4. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Purwakarta dalam mengatasi kendala dalam penyelesaian prosedur dan proses penghapusan NPWP antara lain:
    1. Menambah jumlah pegawai pada bagian seksi pemeriksaan dan seksi pelayanan perpajakan guna memaksimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak.
    2. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta khususnya bagian seksi pelayanan perpajakan lebih menekankan dan menghimbau kepada Wajib pajak untuk melengkapi persyaratan jika ingin mengajukan permohonan penghapusan NPWP.

4.2 Saran

Setelah penulis melaksanakan kerja praktek, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk kemajuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta diantaranya sebagai berikut:

1. Agar mempertahankan proses kerja seksi pelayanan khususnya dalam pelayanan administrasi penghapusan NPWP, serta meningkatkan koordinasi kerjasama antara pihak-pihak atau bagian-bagian yang terkait dengan proses pelayanan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Adanya sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar mengenai prosedur dan proses penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pentingnya penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai Pemenuhan hak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan objektif dan subjektif.